



**TANGGAPAN, MASUKAN, DAN PERTANYAAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
DALAM RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
RABU, 26 JANUARI 2022**

**Pembahasan : 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
2. Automatic Adjustment Belanja Kementerian
Kementerian Kelautan dan Perikanan TA.2022; dan
3. Rencana Program dan kegiatan Tahun 2022.**

Disampaikan oleh : Ir. H. T.A. KHALID, M.M.

No Anggota : A-71

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,

Salam Indonesia Raya

Yang Terhormat,

- 1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**
- 2. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI;**
- 3. Bapak Sekjen KKP beserta seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

Sehubungan dengan pembahasan materi rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021; *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian

Kementerian Kelautan dan Perikanan TA.2022; dan Rencana Program dan kegiatan Tahun 2022. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut;

1. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2021 rata-rata 98,88% pada Unit Kerja Eselon I KKP. Tapi penyerapan anggaran tersebut tidak dibarengi dengan diakomodirnya usulan bantuan program untuk CPCL dari Anggota Komisi IV DPR RI. Kami menerima banyak keluhan dari beberapa CPCL di daerah pemilihan terkait tidak terealisasinya program bantuan dari KKP untuk Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan terutama bantuan dari Ditjen. Perikanan Budidaya dan Ditjen. Perikanan Tangkap. Kami meminta Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan memerintahkan Dirjen terkait agar CPCL tahun 2021 yang telah diusulkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI menjadi prioritas penerima bantuan tahun 2022.
2. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan terkait program peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan konteks kesejahteraan nelayan. Karena terbitnya PP No. 85 tahun 2021 tentang PNBP justru mengundang protes para nelayan dan pengusaha kapal perikanan tangkap di Indonesia. Pasalnya PP tersebut dianggap memberatkan karena kenaikan PNBP mencapai hingga 150% lebih. Kami menilai perlu dilakukan kajian ulang dan penundaan terhadap pemberlakuan PP dan Peraturan Menteri terkait, mengingat kondisi usaha perikanan tangkap saat ini sedang lesu menyusul adanya pandemi Covid-19. Pengkajian tersebut harus melibatkan para pihak terkait khususnya nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
3. Realisasi program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 adalah Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan di 19 provinsi dan 98 Kabupaten/Kota dengan total pemberian sertifikat 12.896 bidang sertifikat tanah, Fraksi Partai Gerindra meminta data terkait lokasi nelayan penerima Program SeHat dan bagaimana monitoring paska pemberian sertifikat.

4. Realisasi Program Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021, terdapat Program 18 pulau kecil dan Pemeriksaan Pemanfaatan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil serta pengawasan 5 kegiatan reklamasi. Fraksi Gerindra meminta KKP untuk memastikan kembali tidak adanya perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat dalam kondisi pandemi Covid-19 ini masih terjadi penambangan pasir di Makassar, reklamasi pantai Losari, reklamasi teluk Jakarta, dan lainnya.
5. Bantuan kapal nelayan saat ini hanya terpaku pada ukuran 5GT, Fraksi Partai Gerindra menilai hal ini perlu dievaluasi. Dikarenakan di beberapa daerah masih banyak nelayan-nelayan kecil yang memerlukan ukuran kapal ataupun perahu dengan kapasitas 1 GT sampai 3 GT. Kami meminta Bapak Menteri untuk memprioritaskan pengadaan bantuan kapal bagi nelayan-nelayan kecil dengan ukuran 1 sampai 3 GT.
6. Pada awal tahun 2021, pelabuhan Untia di Sulawesi Selatan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi sampai saat ini belum difungsikan karena belum ada persetujuan terkait organisasi pelabuhan Untia yang dikeluarkan oleh MENPANRB. Terkait hal ini Kami Fraksi Partai Gerindra meminta agar KKP dapat berkoordinasi dengan MENPANRB agar pelabuhan tersebut dapat segera beroperasi dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
7. Nilai ekspor-impor produk perikanan kita pada 5 tahun terakhir terus meningkat yang menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar dan motor penggerak ekonomi masyarakat. Akan tetapi pagu anggaran KKP mengalami penurunan dari 6,65 triliun tahun 2021 menjadi 6,11 triliun di tahun 2022. Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah menyesuaikan anggaran KKP dengan menaikkan Pagu Anggaran KKP saat ini, agar nilai ekspor komoditas utama sektor kelautan dan perikanan meningkat begitu juga dengan usaha sektor perikanan budidaya agar semakin berkembang dan menjadi andalan penggerak ekonomi masyarakat.
8. Dalam realisasi kegiatan prioritas KKP Tahun 2021, Ditjen PSDKP hanya melepasliarkan penyu sebanyak 194 ekor. Fraksi Partai Gerindra menilai,

jumlah tersebut masih tergolong sangat sedikit dan perlu ditingkatkan. Kami mendorong PSDKP memperkuat kolaborasi dengan komunitas peduli penyu, kelompok masyarakat maupun LSM lainnya dengan mengalokasikan program bantuan dan pembinaan penangkaran penyu. Dengan harapan, jumlah penyu yang dilepasliarkan tahun 2022 dan selanjutnya akan lebih banyak. Hal ini penting untuk menjaga populasi penyu di Indonesia yang populasinya terus berkurang.

9. Realisasi KUR Tahun 2021 sebesar Rp.8,05 Triliun meningkat 53,04% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.5,02 Triliun untuk 173.355 pelaku usaha. Agar pelaku usaha dapat bangkit di tengah pandemi Covid-19, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan berapa target nilai pembiayaan sektor kelautan perikanan tahun 2022? dan berapa persen target KKP dalam program menyalurkan KUR khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti nelayan, dan petambak garam mengingat sulit bagi mereka mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk dinyatakan layak mendapatkan pinjaman modal.
10. Fenomena lapangan banyak masyarakat kelautan dan perikanan secara nasional masih belum familiar, merasa belum banyak manfaat dalam menopang kesejahteraan secara berkelanjutan dengan program dan kegiatan bantuan yang dilakukan oleh KKP, oleh karena itu kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar mengalokasikan anggaran yang cukup dan signifikan untuk kegiatan sosialisasi dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) pada semua level eselon I di KKP. Sedangkan pada rencana anggaran tahun 2022 setelah di breakdown dalam rapat teknis dengan para Tenaga Ahli misalnya di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) untuk setiap kegiatan Bimtek anggarannya sangat sedikit bahkan tidak mencukupi, dalam hal ini kami Fraksi Partai Gerindra meminta supaya anggaran ditambah serta model/bentuk kegiatannya benar benar kolaboratif antara KKP dengan Komisi IV DPRRI supaya kegiatan Bimtek tepat sasaran.
11. Bantuan-bantuan strategis kepada masyarakat dari KKP masih sangat sedikit misalnya, Kampung Nelayan, Keramba Jaring Apung, Bioflok,

Mesin Pakan Ikan, Kapal Boat, Mobil Berpendingin, Pitap dan lain-lain, bahkan wilayah-wilayah strategis (wilayah yang diapit dengan garis pantai, misalnya Aceh) belum mendapatkan bantuan strategis tersebut. Oleh sebab itu kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperhatikan dan memprioritaskan daerah-daerah potensial Kelautan dan Perikanan di Indonesia untuk dialokasikan dan tepat sasaran bantuan bantuan strategis tersebut di tahun 2022 ini.

12. Rencana program kegiatan KKP tahun 2022 sangat banyak untuk kegiatan yang bersifat skala kecil yang mempunyai nilai pengembangan ekonomi dan keberlanjutan yang rendah untuk masyarakat nelayan, masyarakat pembudidaya, petambak garam, masyarakat pesisir dan UMKM yang bergerak sektor kelautan dan perikanan, oleh karena itu kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia supaya seluruh kegiatan tersebut terintegrasi dan tidak parsial supaya nilai pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dapat dirasakan secara signifikan.
13. Pencurian ikan masih marak diperairan WPPNRI dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. PSDKP saat ini hanya memiliki 30 unit kapal pengawas yang sudah berusia di atas 10 tahun. Sementara itu, dibutuhkan 70 unit kapal pengawas dengan kondisi baik untuk dapat mengawasi seluruh WPPNRI (kajian internal PSDKP). Tahun 2022 akan dibangun 2 unit kapal pengawas *multi years contract* tahun 2022-2023 dan mendapatkan hibah kapal dari Jepang. Fraksi Partai Gerindra meminta KKP mengutamakan pengadaan kapal pengawas, mengingat hal ini penting untuk mencegah *illegal fishing* dan kegiatan ilegal laut lainnya serta berkaitan dengan kewibawaan negara dalam menjaga wilayah laut dan perairan Indonesia.
14. Pada TA 2022 ini KKP akan melakukan *Automatic Adjustment (AA)* sebesar 5% atau sebesar Rp.296.586.883.000,- Pada bahan rapat memang dituliskan, bahwa tidak akan mengurangi output prioritas, tetapi Fraksi Partai Gerindra perlu komitmen langsung dari Bapak Menteri dan meminta data rinci dari KPP bahwa AA ini tidak akan mengganggu CPCL

tahun 2022 yang telah diusulkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, dan dituangkan dalam kesimpulan raker hari ini.

15. Terkait kegiatan prioritas tahun 2022 yaitu Premi Asuransi, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan asuransi itu akan didistribusikan di daerah mana saja. Karena di beberapa dapil Anggota Komisi IV baik dinas maupun kawan-kawan nelayan banyak yang tidak dapat mengakses program tersebut. Fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan masa berlaku bantuan program premi asuransi nelayan ini minimal 2 tahun bukan 1 tahun. Mengingat belum stabilnya kondisi ekonomi para nelayan kita saat ini.
16. Terkait dengan permasalahan nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jawa Tengah yang mana terdapat ratusan kapal nelayan yang tidak bisa melaut disebabkan proses perizinan eks. kapal nelayan dengan alat tangkap centrang yang beralih ke alat tangkap jaring tarik berkantong belum juga diterbitkan. Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan, berapa lama waktu pengurusan izin sesuai ketentuan di KKP?. Kami juga meminta Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan memerintahkan jajaran terkait untuk mempermudah prosedur dan mekanisme pengurusan dokumen kapal serta segera menerbitkan izin melaut. Karena akibat lambannya proses perizinan tersebut, nelayan tidak memiliki penghasilan. Kerugian lainnya adalah banyaknya jumlah kapal yang bersandar mengakibatkan benturan yang dapat merusak kapal nelayan bahkan ada yang sampai tenggelam.
17. Beberapa waktu yang lalu para nelayan dari Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur didampingi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), LBH Surabaya dan Walhi Jawa Timur mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur untuk melaporkan adanya aktivitas Kapal Centrang di Wilayah Kepulauan Masalembu. Terkait hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra meminta KKP dan instansi terkait di Kepulauan Masalembu untuk segera memindaklanjuti laporan tersebut. Kasus di Kepulauan Masalembu adalah fenomena gunung es, akibat adanya tumpang tindih peraturan dan tidak sinkron, sehingga

pelaku usaha dan petugas melakukan interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan yang berlaku.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;

Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI;

Bapak Sekjen KKP, dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;

Demikian tanggapan, catatan, masukan, dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Indonesia Raya.

KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI

| | |
|---|--------------------------------|
| G. Budisatrio Djiwandono | - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI |
| Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU | - Kapoksi |
| DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. | - Anggota |
| Ir. H. TA Khalid, M.M. | - Anggota |
| DR. H. Azikin Solthan, M.Si. | - Anggota |
| Hj. Renny Astuti, S.H., S.pN. | - Anggota |
| Ir. Dwita Ria Gunadi | - Anggota |